

PENGARUH PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIMEDIASI DYSFUNCTIONAL BEHAVIOR DI KABUPATEN SARMI

Westim Ratang
westimratang@gmail.com

Abstrak

This study aims to analyze empirically the effect of the Regional Financial Accounting system on the quality of financial reports, and to analyze empirically the effect of the Regional Financial Accounting system on the quality of financial statements moderated by dysfunctional behavior. The number of samples in this study were as many as 20 people, drawn from all regional apparatus organizations in Sarmi Regency. The results of this study indicate that the regional financial accounting system has a positive effect on the quality of financial reports, the better the implementation of the regional financial accounting system will make the regional financial reports more qualified. The regional financial accounting system has an effect of 37.0% on the quality of financial reports. The regional financial accounting system moderated by dysfunctional behavior has a negative effect on the quality of financial reports. The implementation of the regional financial accounting system if supported by high dysfunctional behavior will reduce the quality of financial reports. The regional financial accounting system which is moderated by dysfunctional behavior has an effect of 60.1% on the quality of financial reports.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Dengan Dysfunctional Behavior*

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi ini, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai good government governance di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi adalah bidang birokrasi pemerintahan yang menuntut beragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang

berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Permendagri 13 tahun 2006). Sistem ini menggantikan sistem lama yang selama ini digunakan yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) yang telah diterapkan sejak tahun 1981.

Kesuksesan implementasi sebuah sistem tentu saja tak lepas dari perilaku individu pelaksana sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lily Sugeng (2009) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian manajerial pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh pelaksana SKPD itu sendiri yang disebut sebagai perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior). Penerapan SIKD yang efektif menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi kenyataan. Dengan adanya

perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior) tentu saja akan mempengaruhi negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi kepada penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keperilakuan, terutama penelitian terhadap pengaruh implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap hasil kerja (Work outcomes) dan pengaruhnya terhadap perilaku individu yang dalam hal ini adalah perilaku dysfunctional (dysfunctional behavior).

Kabupaten Sarmi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, Sarmi pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Gambaran pengelolaan keuangan daerah terlihat APBD perubahan yang ditetapkan itu mengalami pengurangan pendapatan sebesar 55.758.147.742 dari sebelum perubahan sebesar 1.136.344.241.160. Pada sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja sebesar 43.872.097.921 dari APBD induk 1.126.344.241.160 sehingga belanja yang ditetapkan dalam APBD-P sebesar 1.170.216.339.081. Adanya penurunan pendapatan dan kenaikan belanja menyebabkan defisit keuangan daerah sebesar 89.630.245.663.

Defisit keuangan 2019 ditutupi dengan pengelolaan SILPA 2018 sebesar 107.588.614.825,29 dengan demikian pembiayaan netto 2019 menjadi 99.630.245.663 antaranya 10.000.000.0000 diserahkan sebagai penyertaan modal pada Bank Papua. Sampai dengan tahun 2018 tercatat penyertaan modal di bank Papua sebesar 52.500.000.000, bertambah 2019 menjadi 62.500.000.000 membawa Sarmi dalam 5 besar pemegang saham penyertaan modal dari 42 kabupaten kota dan 2 provinsi di tanah Papua. Berkurangnya APBD 2019 antara lain karena adanya kebijakan anggaran namun demikian pemerintah daerah masih dapat membiayai program – program strategis dan unggulan daerah kabupaten Sarmi, Sementara itu terkait TLHP-BPK RI, DPRD mengingatkan OPD pemerintah Kab Sarmi agar semakin serius mengelola pencatatan dan pelaporan keuangan kas di bendahara, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan belanja dan aset dengan lebih baik lagi dan merekomendasikan agar banyak berkonsultasi dengan BPK RI dalam

memenuhi rekomendasi lembaga pengawas tersebut. Dewanpun berharap penyerapan anggaran sebesar 52 % yang telah dicapai sebelum APBD-P ditetapkan akan terserap seluruhnya hingga akhir tahun ini.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Sarmi dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan yang baik adalah minimnya sumber daya manusia (SDM). Padahal untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dibutuhkan kemampuan SDM yang mumpuni.

www.bpkp.go.id

Berdasarkan latar belakang yang maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Menganalisis secara empiris mengenai pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Menganalisis secara empiris mengenai pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh *dysfunctional behavior*.

METODE PENELITIAN

Metode Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui google form yaitu dengan mengirimkan kuesioner melalui media sosial khususnya melalui WA, kuesioner yang dapat diisi adalah sebanyak 20 kuesioner:

Analisis Statistik

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan berganda sebagai model yang memprediksi hubungan kausal antara variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Regresi linear sederhana dan regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan dan menguji hubungan variabel *moderating (dysfunctional behavior)* dengan kualitas laporan keuangan. *Moderated*

regression analysis (MRA) digunakan untuk menentukan hubungan interaksi antara variabel oleh satu variabel sebagai variabel *moderating* (Nunnally, 1994). Persamaan statistika yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KLK = a + b_1 \text{ SAKD} + e$$

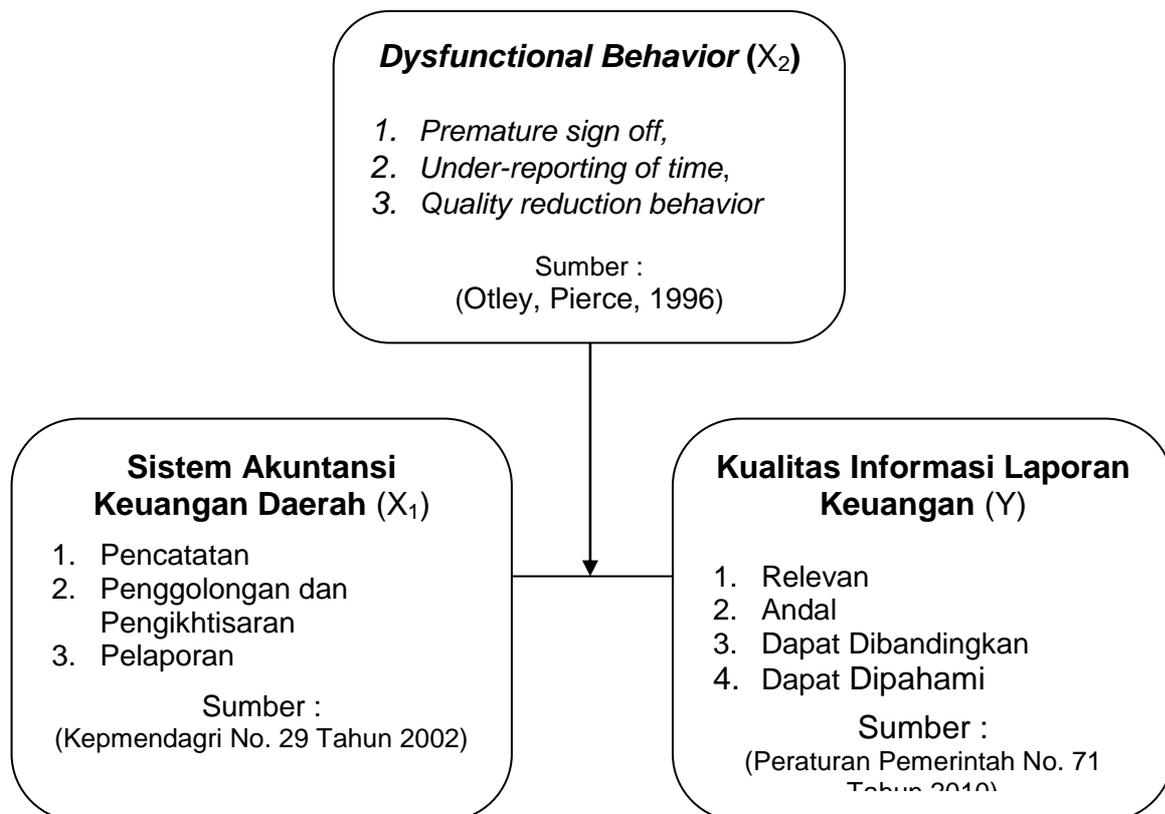
$$KLK = a + b_1 \text{ SAKD} + b_2 \text{ DB} + b_3 \text{ SAKD} * \text{DB} + e$$

Dimana:

- KLK = Kualitas Laporan Keuangan
- SAKD = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
- DB = *Dysfunctional Behavior*
- a = intercept
- e = error

Jika variabel DB merupakan variabel moderator, maka koefisien b3 harus signifikan pada 0,05 atau 0,10.

Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2020

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tanpa Variabel Moderating

Hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan tanpa melibatkan variabel moderating. Adapun langkah pengujian statistik dilakukan sebagai berikut:

a) Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22*, diperoleh hasil regresi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Hasil analisis regresi linier sederhana sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,434	1,369		-,317	,755
	SAKD	1,003	,308	,608	3,252	,004

a. Dependent Variable: KLK

$$KLK = -0,434 + 1,003 \text{ SAKD}$$

Dimana :

KLK = Kualitas laporan keuangan

SAKD = Sistem akuntansi keuangan daerah

Pada persamaan diatas dapat dilihat koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah bertanda positif sebesar 1,003, artinya semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

b) Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan tanpa dimoderasi perilaku disfungsional.

Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,734 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 18 untuk pengujian satu arah. Nilai statistik uji t dapat dilihat pada tabel 4.8 dimana diperoleh nilai t_{hitung} variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sebesar 3,252 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004. H_a yang berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat laporan keuangan daerah semakin berkualitas.

c) Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, selanjutnya dihitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Koefisien determinasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah
terhadap kualitas laporan keuangan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,608 ^a	,370	,335	,65035

a. Predictors: (Constant), SAKD

b. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,370 atau 37,0%, artinya sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 37,0% terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten Sarmi, sedangkan sisanya yaitu 63,0% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

2) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Dimoderasi Oleh Perilaku Disfungsional

Pada bagian ini akan diuji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan perilaku disfungsional sebagai variabel moderating. Adapun langkah pengujian statistik dilakukan sebagai berikut.

a) Analisis Regresi Moderating

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan *software IBM SPSS Statistics 22*, diperoleh hasil regresi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional seperti disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3

Hasil analisis regresi sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan dengan perilaku disfungsional sebagai variabel moderating

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,667	1,255		,531	,603
SAKD	,792	,270	,480	2,938	,010
DB	-,060	,144	-,066	-,417	,682
SAKD*DB	-,406	,133	-,502	-3,046	,008

a. Dependent Variable: KLK

Melalui nilai *unstandardized coefficients* (B) yang terdapat pada tabel 10 maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 0,667 + 0,792 \text{ SAKD} - 0,060 \text{ DB} - 0,406 \text{ SAKD*DB}$$

Dimana :

KLK = Kualitas laporan keuangan

SAKD = Sistem akuntansi keuangan daerah

DB = Perilaku disfungsional

Pada persamaan diatas dapat dilihat nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional (SAKD*DB) bertanda negatif sebesar 0,406, artinya penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan perilaku disfungsional diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

b) Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

Statistik uji yang digunakan pada pengujian hipotesis diatas adalah uji t, nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,746 yang diperoleh dari tabel t pada $\alpha = 0.05$ dan derajat bebas 16 untuk pengujian dua arah. Nilai statistik uji t dapat dilihat pada tabel 4.10 dimana diperoleh nilai t_{hitung} variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional (SAKD*DB) sebesar -3,046 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008.

Artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti ermiris bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan perilaku disfungsional yang tinggi diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

c) Analisis Koefisien Determinasi

Setelah diuji dan terbukti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh nrgatif terhadap kualitas laporan keuangan, selanjutnya dihitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan seperti disajikan pada tabel dibaawah ini:

Tabel 4
Koefisien determinasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775 ^a	,601	,527	,54876

a. Predictors: (Constant), SAKD*DB, DB, SAKD

b. Dependent Variable: KLK

Berdasarkan data pada tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,601 atau 60,1%, artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya yaitu 39,9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hipotesis pertama yang akan diuji adalah pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan tanpa melibatkan variabel moderating. dapat dilihat koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah bertanda positif sebesar 1,003, artinya semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat laporan keuangan daerah semakin berkualitas.

Berdasarkan data pada tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,370 atau 37,0%, artinya sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 37,0% terhadap kualitas laporan keuangan di

kabupaten Sarmi, sedangkan sisanya yaitu 63,0% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus (2017) serta penelitian yang dilakukan oleh Drama (2014), dimana dari hasil analisis yang mereka lakukan, ditemukan bahwa system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Salah satu tujuan sistem akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Selain itu, hal yang mendasar dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah manfaat Penerapan Sistem Akuntansi Daerah. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah.

Penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Sebagaimana pengertian dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 Tahun 2011).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Menurut Halim (2008) Akuntansi Keuangan Daerah dapat didefinisikan sebagai Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas dan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri.

Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem

akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji. Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yang diperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan Mardiasmo (2009) bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.

Pengaruh sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh *dysfunctional behavior*.

Hasil regresi menunjukkan nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional (SAKD*DB) bertanda negatif sebesar 0,406, artinya penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan perilaku disfungsional diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Hasil uji hipotesis ke dua menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa

pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan perilaku disfungsional yang tinggi diprediksi akan menurunkan kualitas laporan keuangan.

Setelah diuji dan terbukti bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, selanjutnya dihitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh koefisien determinasi sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional terhadap kualitas laporan keuangan.

Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,601 atau 60,1%, artinya sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya yaitu 39,9% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang berlatar belakang atau memahami bidang akuntansi dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan, begitu pula sebaliknya, apabila bidang akuntansi diisi oleh SDM yang tidak berkompetensi di bidang akuntansi dapat menjadi pengaruh kurangnya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi

atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. (Indriasari, et al. 2008) kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya dan perilaku yang dimilikinya.

Pegawai dituntut dapat melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan berkualitas. Kualitas pekerjaan pegawai berhubungan dengan kualitas keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, dan sikap independensinya. Kualitas laporan yang dihasilkan diartikan sebagai probabilitas seorang pegawai dapat menentukan dan melaporkan transaksi keuangan yang terjadi dalam sistem akuntansi. Pegawai mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya dalam membentuk kepercayaan para pemakai informasi pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pegawai berwenang bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan baik maka para pemakai laporan keuangan dapat mempercayai bahwa laporan keuangan tersebut andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Implementasi dari sistem akuntansi keuangan daerah diharapkan dapat memenuhi tuntutan dari masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik (Mardiasmo,2002). Rintangan penting untuk tercapainya kesuksesan dari suatu implementasi sistem yang baru adalah kurangnya perhatian pada faktor perilaku selama implementasi. Selain itu masih sedikit penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan faktor–faktor perilaku selama tahap implementasi system baru serta pengaruh sistem tersebut terhadap kepuasan dan kinerja (Cavallozo dan Ittner , 2004).

Kesuksesan implementasi sebuah sistem tentu saja tak lepas dari perilaku individu pelaksana sistem tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lily Sugeng (2009) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan aktivitasnya sering kali terjadi suatu penyimpangan perilaku atau pelanggaran yang disengaja di luar dari aturan dan prosedur sistem pengendalian manajerial pemerintah daerah yang biasanya dilakukan oleh pelaksana SKPD itu sendiri yang disebut sebagai perilaku *dysfunctional* (*dysfunctional behavior*). Penerapan SIKD yang efektif menuntut adanya pemahaman utuh dari pelaksana manajemen keuangan daerah dan adanya penyempurnaan secara terus menerus dari instansi yang berkewenangan sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat menjadi kenyataan. Dengan adanya perilaku *dysfunctional* (*dysfunctional behavior*) tentu saja akan mempengaruhi negatif implementasi sebuah sistem (Sabaroyeen,2006).

SIMPULAN

1. Kesimpulan

- 1) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, semakin baik pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah akan membuat laporan keuangan daerah semakin berkualitas. Sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh sebesar 37,0% terhadap kualitas laporan keuangan.
- 2) Sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku disfungsional berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah jika didukung dengan perilaku disfungsional yang tinggi akan menurunkan kualitas laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dimoderasi oleh perilaku

disfungsional memberikan pengaruh sebesar 60,1% terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini, maka saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Perlunya diadakan pembinaan atau pelatihan terhadap pegawai bagian keuangan yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan sehingga lebih memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika yang membentuk karakter yang selalu bersikap professional.
2. Perlu adanya sistem dan prosedur pelaksanaan tugas, pembagian tugas yang baik untuk menghindari kompleksitas tugas dan perlunya mengikuti pelatihan (*training*) untuk menunjang keterampilan dan keahlian.
3. Perlu adanya pembinaan sikap profesional agar pegawai dalam membuat laporan keuangan lebih memperhatikan dan tidak mengabaikan implikasi system akuntansi keuangan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variable lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga semakin banyak referensi tentang factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan setiap organisasi perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, Tanjung. 2009, **Akuntansi Pemerintahan Daerah**. Jakarta Alfabeta
- Abdul Halim dkk*, 2012. **Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Andy Field (2009). **Discovering Statistics Using SPSS**. (3rd ed.). SAGE Publications Ltd
- Arikunto, S.* 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: Rineka Cipta
- Barker, C. Pistrang, N & Elliot, R (2016). **Research Methods in Clinical Psychology**. (3rd ed.). John Wiley & Sons, LTD, Chichester UK
- Cooper, D. R, & Schindler, P. S. (2014). **Business Research Methods**.(12th ed.). Mc Graw Hill Companies, Inc. New York
- Bastian Indra.* 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat
- Basuki dan Krisna.Y. Mahardani.2006. **Pengaruh Tekanan Anggaran dan Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publikdi Surabaya**. Jurnal Maksi. Vol. 6 No 203
- Behavior: an Empirical Investigation". Accounting Behaviour
- Cavalluzzo, K.S. dan C.D. Ittner. 2004. **Implementing Performance Measurement Innovations: Evidence from Government**. Accounting, Organizations and Society 29: 243-267
- Chan, Samuel Y.S. and Leung, Philomena 2006, **The effect of accounting student's ethical reasoning and personel factors on their ethical sensitivity**, Managerial Auditing Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 436-457
- Donnelly, et al ,2003. **"Auditor Acceptance of Dysfunctional Audit Behavior: An Explanatory Model Using Auditors' Personal Characteristics"**. Behavioral Research in Accounting, Vol 15.
- Fajar dan Heru.* 2010. **Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Dasar. Meraih Keunggulan Bersaing**. Edisi Pertama, Yogyakarta
- Hair et al.,* 1998, **Multivariate Data Analysis**, Fifth Edition, Prentice Hall, Upper Saddle
- Harahap,* Sofyan Syafri. 2008. **Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan**. Raja. Grafindo Persada, Jakarta
- Harken Drama, 2014, **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem**

Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Studi Empiris pada SKPD Kota Solok

Mardiasmo, 2002, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Penerbit. ANDI, Yogyakarta

Roviyantie, Devi. 2011. **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.** Jurnal akuntansi Universitas Siliwangi

Siregar, *Baldric dan Boni, Siregar, 2001. Akuntansi Pemerintahan dengan sistem Dana.*, STIE, YKPN,. Yogyakarta

Sudjono, Dona Primasari, & Ratu Ayu Sriwulandari, 2014, **Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai: Dysfunctional Behavior Sebagai Variabel Moderating** Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta

Supranto M. A. 2000. Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1, Edisi Keenem. Erlangga, Jakarta

Welly Surjono dan Nova Roslina Firdaus, 2017, **Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan DPPK Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung**

Wiyantoro, Lili Sugeng dan Sabeni, Arifin. 2007. **Hubungan antara Sistem Pengendalian Manajemen dengan Perilaku Dysfungsional: Budaya Nasional sebagai Variabel Moderating,** Prosiding Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.

Regulasi :

Pemendagri No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah SAKD menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara